




LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) TAHUN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jln. Setia Budi No. 200 Painan Kode Pos : 25651
Telp. (0756) 21293, E-mail : dpmppkbessel@gmail.com

 <https://dpmppkb.pesisirselatankab.go.id/>
DPMPPKB Kab. Pesisir Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas karunianya dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang telah berhasil disusun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan telah merespon tersebut, sehingga dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, yang berfungsi sebagai bahan penilaian kinerja, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, sebagai pengendali peningkatan kinerja berdasarkan sasaran strategis, urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, serta ini akan menjadi masukan terhadap Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Demikian disampaikan semoga dokumen penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, 5 Januari 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	4
2.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	24
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	26
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	27
3.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuankan	27
3.2. Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	28
BAB IV PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) merupakan laporan tahunan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Pemerintah Daerah dan kepada DPRD berisi informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik selama 1 Tahun Anggaran, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Laporan ini memuat capaian program, penggunaan anggaran, serta evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. LKPj memuat informasi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan merupakan suatu pertanggungjawaban dari Implementasi dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati Pesisir Selatan, terhadap Pengguna Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 dan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 Tahun Anggaran yang akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Menjabarkan secara rinci proses pelaksanaan kegiatan, mulai dari sebelum dilaksanakan, saat berlangsung dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan ini juga dapat menggambarkan masalah yang dihadapi oleh setiap pelaksana kegiatan dan pada akhirnya dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk kegiatan di masa mendatang.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang berdasarkan proses pelaksanaan tahun sekarang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Untuk menyampaikan secara transparan capaian kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah yang akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengukur kemampuan tim pelaksana kegiatan dalam mempertanggungjawabkan hasil kerja masing-masing pihak yang terlibat, serta apapun yang menyangkut keuangan, termasuk pemasukkan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Sebagai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada Bupati Pesisir Selatan.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah selama Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2025 dengan melaksanakan Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
4. Program Pengendalian Penduduk;
5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Adapun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mendapatkan Total Pagu Anggaran **Rp. 15.510.426.366,-** Terrealisasi Anggaran **Rp. 13.204.978.049,-** sedangkan untuk Capaian Anggaran **85,14%** dengan Rincian Capaian Kinerja Tahun 2024 yang disusun pada tabel sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A 81,00	A 80,21	99,02%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.502.538.820	Rp. 5.380.558.383	97,78%
		Jumlah Nagari Mandiri	56 Nagari	87 Nagari	155,36%	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 524.488.959	Rp. 476.655.498	90,88%
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 909.705.488	Rp. 761.583.920	83,72%
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	80	93	116,25%				
3.	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB	62,14%	63,77%	102,62%	Pengendalian Penduduk	Rp. 259.196.099	Rp. 189.923.447	73,27%
						Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.065.897.000	Rp. 4.260.275.110	70,23%
						Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.248.600.000	Rp. 2.135.981.691	94,99%
Total					118,31%		Rp. 15.510.426.366	Rp. 13.204.978.049	85,14%

Sumber Data : Capaian Kinerja DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

2. Capaian Kinerja urusan masing-masing kegiatan pada setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan sesuai dengan target dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang dihadapi serta Solusi Pemecahannya

Tabel 2.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2025

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	97,78	5.502.538.820	5.380.558.383
			2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	99,99	21.220.000	21.217.000

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	25	21.220.000	21.217.000
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	98,45	3.876.209.473	3.816.103.603
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	35	35	3.777.641.473	3.717.551.603
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	98.568.000	98.552.000
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	94,82	6.484.100	6.147.900
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	6.484.100	6.147.900
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	99,58	187.697.671	186.902.935
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	3	1.956.173	1.884.860

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	5	5	18.942.470	18.420.450
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1	34.596.830	34.485.300
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	20.052.198	20.012.647
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	2	2	3.600.000	3.600.000
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	9.174.000	9.173.000
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	99.376.000	99.326.678
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	99,41	171.628.716	170.616.416
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	1	29.100.000	28.087.706

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	142.528.716	142.528.710
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	92,01	197.298.860	181.532.629
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	40.690.000	38.712.837
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak, dan Perizinannya	Unit	61	59	85.160.500	84.030.792
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	23	23	8.100.000	8.100.000
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	1	63.348.360	50.689.000
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang memiliki Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	%	100	90,88	524.488.959	476.655.498

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	182	182	524.488.959	476.655.498
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	2	2	2.088.700	2.086.700
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	1	51.999.900	50.451.183
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Dokumen	15	15	4.900.000	4.892.000
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Nagari	58	58	442.816.564	396.575.850
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	1	1	2.684.000	2.684.000
				Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	19.999.795	19.965.765

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Dasawisma Maju	%	100	83,72	909.705.488	761.583.920
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	%	100	83,72	909.705.488	761.583.920
				Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	6.298.652	6.291.500
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruuna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	1269	1269	255.143.056	153.687.580
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1	6.160.000	6.160.000
				Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	642.103.780	595.444.840

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
B.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	73,27	259.196.099	189.923.447
			2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	73,27	259.196.099	189.923.447
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	1	59.996.099	57.295.119

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedianya	Dokumen	1	1	109.200.000	70.200.000
				Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	1	90.000.000	62.428.328
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pelaksanaan Pelayanan KB dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%	100	70,23	6.065.897.000	4.260.275.110
				Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1	1	1.639.000.000	1.128.826.510
				Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	1	1.014.000.000	789.665.850

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	180	180	300.000.000	177.807.000
				Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	2	2	125.000.000	94.213.000
				Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	1	1	200.000.000	67.140.660
				Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Organisasi	1	1	1.448.800.000	1.321.600.000
				Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	1	1	1.448.800.000	1.321.600.000

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	974.900.000	854.960.600
				Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	28.800.000	28.800.000
				Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	2250	2000	879.816.000	773.770.600
				Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	1	66.284.000	52.390.000

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	15	15	2.003.197.000	954.888.000
				Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	1	1	1.002.197.000	477.000.000
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	15	15	1.001.000.000	477.888.000
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Sejahtera (KS)	%	100	94,99	2.248.600.000	2.135.981.691
				Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	100	94,99	2.248.600.000	2.135.981.691
				Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	58.523	58.000	2.248.600.000	2.135.981.691

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	95,78	1.042.000.000	998.037.900
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	95,78	1.042.000.000	998.037.900
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	15	4	1.042.000.000	998.037.900
Total Anggaran (Rp.)									13.357.074.145	12.060.667.517

Sumber Data : Aplikasi SIPD-RI Kemendagri dan Realisasi Anggaran dari Fungsional Desember DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

▪ **Permasalahan dan Solusi :**

✚ **Permasalahan :**

1. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya :

1. Belum Optimalnya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari untuk Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa terhadap RPJM Nagari dan RKP Nagari disinkronisasikan dengan RPJMD Kab. Pesisir Selatan;
2. Belum Optimalnya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari untuk Memfasilitasi Penyusunan Profil Desa/Nagari terhadap tahapan Perubahan Status Nagari mulai dari Nagari Berkembang, Nagari Maju sampai dengan Nagari tersebut layak dikatakan menjadi Nagari Mandiri;
3. Masih adanya perbedaan pemahaman tentang Kepengurusan KAN dan Historis Adat dimasing-masing KAN di Kab. Pesisir Selatan;
4. Belum banyaknya peran dari LPMN dalam Forum Musrenbang Nagari;
5. Masih kurangnya SDM sebagai Pengurus PKK dan kurangnya peranan PKK dalam Masyarakat.

2. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan :

1. Tidak memadainya anggaran kegiatan KKN yang dilaksanakan di Kab. Pesisir Selatan yang lokasinya berada di berbagai Kecamatan untuk mendukung kegiatan KKN ini;
2. Adanya UPK yang bermasalah dengan hukum;
3. Tidak adanya laporan pertanggungjawaban BUMNag, BUMNag Bersama dan UPK dari pengurus serta banyaknya masa periode kepengurusan habis dan tidak aktif;
4. Tidak sinkronnya kegiatan unit usaha yang dijalankan dengan keadaan dan potensi Nagari akan memberikan Pendapatan Asli Nagari (PAN);
5. Adanya UPK yang belum bertransformasi ke BUMNag Bersama;
6. Tidak dapat diikutinya kegiatan lomba TTG dan BUMNag, baik Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional karena tidak adanya anggaran;
7. Kurangnya Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke Nagari, Kecamatan dan Provinsi karena keterbatasan anggaran.

3. Bidang Pemerintahan Nagari :

1. Banyaknya permasalahan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari;
2. Kurangnya kemampuan dan pemahaman Pemerintah Nagari tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
3. Belum memenuhi syarat sebagai PAW Wali Nagari dan Bamus Nagari serta belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Belum terkelolanya Penataan Aset Nagari dan kurangnya dukungan anggaran terhadap sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan di 182 Nagari;
5. Belum optimalnya Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi antara Pemerintah Nagari, Kecamatan dan DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan.

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Kurangnya Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Tingkat Kecamatan dari 182 Nagari sedangkan Jumlah PKB hanya 36 Orang persebaran tidak merata;
2. Kurangnya minat akseptor dalam menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
3. Kurangnya perhatian dan pembinaan serta dukungan dana untuk Pembinaan Penyuluh Kampung KB;
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan dukungan lintas sektor terhadap perkembangan kegiatan di Kampung KB;
5. Pelaksanaan kegiatan harus ditalangi dulu oleh Koordinator Lapangan untuk semua kegiatan BOKB;
6. Keterbatasan anggaran untuk Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi dari Kabupaten sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang sudah dibentuk dari Nagari dan Kecamatan, sedangkan lokasi sasaran yang akan dilakukan pendampingan memerlukan biaya transportasi dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting;
7. Kurangnya dukungan dana APBD sebagai Pendamping Akseptor KB dan Kader KB ke Lapangan yang terdapat 182 Nagari dan 15 Balai Penyuluh KB Kecamatan pada Program Bangga Kencana untuk Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) karena tidak mencukupi dari APBN (BOKB) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik, maka sangat perlunya support dari APBD (DAU) untuk kelancaran tugas Pendamping Akseptor KB dan Kader KB ke Lapangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

 **Solusi :**

1. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya :

1. Mengoptimalkan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari dengan memberdayakan Tenaga Ahli P3PD, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan untuk mendampingi Nagari dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa terhadap RPJM Nagari dan DU-RKP Nagari tahun berikutnya;
2. Mengoptimalkan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke 182 Nagari untuk Memfasilitasi Penyusunan Profil Desa/Nagari terhadap tahapan Perubahan Status Nagari mulai dari Nagari Berkembang, Nagari Maju sampai dengan Nagari tersebut layak dikatakan menjadi Nagari Mandiri dari berbagai aspek yang telah ditetapkan;
3. Agar 37 KAN di Kab. Pesisir Selatan membuat Monografi Adat secara tertulis, agar penyelenggaraan KAN dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Agar LPMN mempunyai peranan dalam Forum Musrenbang Nagari dan memahami Tugas Pokok dan Fungsi dalam kelembagaan di Nagari;
5. Memanfaatkan SDM yang ada untuk dilakukan Sosialisasi dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kemampuan Pengurus PKK serta memiliki peranan PKK di masyarakat.

2. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan :

1. Untuk Kegiatan KKN Tematik yang diadakan di Kab. Pesisir Selatan pelaksanaannya langsung dilakukan dilokasi kegiatan KKN;
2. Memfasilitasi data dan informasi terkait UPK yang bermasalah;
3. Memberdayakan Tenaga Ahli P3PD, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang ada untuk mendampingi proses pembentukan dan pengaktifan BUMNag, BUMNag Bersama dan UPK yang bermasalah, habis masa kepengurusan serta yang kurang aktif;
4. Lebih memberdayakan lagi pendamping yang ada di Nagari, Kecamatan maupun Kabupaten untuk memverifikasi Unit Usaha yang ada di Nagari agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Nagari sehingga dapat memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Nagari (PAN);

5. Untuk UPK yang belum bertransformasi diserahkan ke DPMD Provinsi Sumatera Barat;
6. Kegiatan TTG dan BUMNag yang diselenggarakan setiap Tahun tidak diikuti;
7. Merekap data yang dikirim oleh Kecamatan terkait data BUMNag, BUMNag Bersama dan UPK di DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan.

3. Bidang Pemerintahan Nagari :

1. Untuk meminimalisir terjadinya permasalahan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus Nagari perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, pemahaman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tentang regulasi dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Nagari melalui Peningkatan Kapasitas, Bimtek atau Pembinaan ke Nagari;
2. Perlu dilaksanakan Bimtek secara berkelanjutan untuk Perangkat Nagari dan membuat forum diskusi bagi Perangkat Nagari bersama OPD terkait (DPMDPKB, BPKPAD dan Inspektorat) untuk berkoordinasi tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
3. Mewajibkan setiap Nagari mengirimkan 1 Perwakilan dari 182 Nagari untuk mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari;
4. Agar sesuai dengan persyaratan sebagai PAW Wali Nagari dan Bamus Nagari serta berpedoman dengan peraturan yang berlaku ditetapkan;
5. Perlunya koordinasi antar pihak agar Penataan Aset di Nagari dapat terkelola dengan baik dan dukungan anggaran terhadap sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan di 182 Nagari;
6. Perlunya dilakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke Nagari.

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Mengoptimalkan pertemuan rapat koordinasi bulanan di DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan dengan PKB/PLKB Kecamatan, agar adanya minat akseptor menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
2. Pembagian wilayah kerja sasaran berdasarkan domisili Tim Pendamping Keluarga (TPK) dilakukan ke 182 Nagari, dalam 1 Nagari rata-rata hanya terdapat 1-2 Orang sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK), untuk itu perlu diajukan penambahan anggaran dan tenaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting;

3. Penyuluh KB agar melakukan koordinasi dengan lintas sektor;
 4. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu kepada Rencana Kerja Bulanan, sehingga kegiatan dilaksanakan dapat terukur sesuai target yang ditetapkan;
 5. Perlu adanya peningkatan dan penambahan anggaran untuk Pembinaan Kampung KB;
 6. Perlunya pemberian pemahaman kepada PKB/PLKB dan masyarakat serta lintas sektor tentang dukungan dan perhatian terhadap Kampung KB;
 7. Setiap program dan kegiatan di Nagari sebaiknya dilibatkan Kampung KB.
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Dalam hal mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja diwujudkan dalam setiap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari Indikator Kinerja Perangkat Daerah, yaitu :

- Nilai AKIP Perangkat Daerah diperoleh dari Dokumen Perangkat Daerah yang telah dievaluasi dan dilakukan penilaiannya, Berdasarkan Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target kinerja A (81,00) dan terrealisasi kinerja A (80,21) sedangkan untuk capaian kinerja 99,02%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 5.502.538.820 dan terrealisasi anggaran Rp. 5.380.558.383 sedangkan untuk capaian anggaran 97,78%.

- Jumlah Nagari Mandiri diperoleh dari Indeks Desa (ID), terdiri dari Nagari Sangat Tertinggal, Nagari Tertinggal, Nagari Berkembang, Nagari Maju dan Nagari Mandiri dan dilakukan penilaiannya ditetapkan secara berjenjang mulai dari Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Pesisir Selatan dengan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) ke DPMD Provinsi Sumatera Barat hingga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan target kinerja 56 Nagari dan terrealisasi kinerja 87 Nagari sedangkan untuk capaian kinerja 155,36%.

Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp. 524.488.959 dan terrealisasi anggaran Rp. 476.655.498 sedangkan untuk capaian anggaran 90,88%.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran Rp. 909.705.488 dan terrealisasi anggaran Rp. 761.583.920 sedangkan untuk capaian anggaran 83,72%.

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

- Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target kinerja 80 dan terrealisasi kinerja 93 sedangkan untuk capaian kinerja 116,25%.

3. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas

- Persentase PUS yang ber-KB merupakan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Alat dan Obat Kontrasepsi yang bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran.

Formulasi :

$$\text{Persentase PUS yang ber-KB} = \frac{\text{Jumlah PUS yang menggunakan KB}}{\text{Jumlah Seluruh PUS}} \times 100\%$$

Persentase PUS yang ber-KB dengan target kinerja 62,14% dan terrealisasi kinerja 63,77% sedangkan untuk capaian kinerja 102,62%.

Program Pengendalian Penduduk dengan anggaran Rp. 259.196.099 dan terrealisasi anggaran Rp. 189.923.447 sedangkan untuk capaian anggaran 73,27%.

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan anggaran Rp. 6.065.897.000 dan terrealisasi anggaran Rp. 4.260.275.110 sedangkan untuk capaian anggaran 70,23%.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan anggaran Rp. 2.248.600.000 dan terrealisasi anggaran Rp. 2.135.981.691 sedangkan untuk capaian anggaran 94,99%.

Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, maka diperoleh total sasaran strategis capaian kinerja 118,31%. Sedangkan Program yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, maka diperoleh total anggaran Rp. 15.510.426.366 dan terrealisasi anggaran Rp. 13.204.978.049 sedangkan untuk capaian anggaran 85,14%.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 dengan pengukuran sasaran strategis, maka diperoleh rata-rata capaian program 118,31%. Berdasarkan klasifikasi penilaian termasuk Sangat Baik. Hasil kinerja yang Sangat Baik ini diharapkan untuk Tahun akan datang supaya dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi menuju Sangat Baik.

2.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tergambar untuk mencapai yang ingin diwujudkan dan mengacu pada Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

Selanjutnya dari 5 Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, maka Misi yang ingin diwujudkan mengacu kepada Misi Nomor 1, 2, 4 dan 5, yaitu :

Misi 1. : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas;

Misi 2. : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

Misi 4. : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif;

Misi 5. : Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

“Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan serta Keluarga Berkualitas”.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Tabel 2.3 Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A 81,00
		Jumlah Nagari Mandiri	56 Nagari
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	80
3.	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas	Persentase PUS yang ber-KB	62,14%

Sumber Data : Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

Tabel 2.4. Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.502.538.820	APBD dan DAK Fisik KB
2.	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 524.488.959	APBD
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 909.705.488	APBD
4.	Pengendalian Penduduk	Rp. 259.196.099	DAK Non Fisik KB
5.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.065.897.000	APBD, DAK Non Fisik KB
6.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.248.600.000	DAK Non Fisik KB
Jumlah		Rp. 15.510.426.366	

Sumber Data : Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut Pemerintah Daerah dituangkan dalam format sebagai berikut :

Tabel 2.5. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan terhadap LKPj Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	2.	3.	4.
Tidak Ada Rekomendasi DPRD			

Sumber Data : Bidang DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuankan

Uraian mengenai Identifikasi Urusan Pemerintahan yang menjadi Tugas Pembantuan, yaitu :

3.1.1. Identifikasi tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya. Alokasi Anggaran serta Realisasi Anggaran, dapat dilihat pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1. Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya Tahun Anggaran 2025

No.	Perangkat Daerah	Program	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Penyerapan (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Tidak Ada Tugas Pembantuan				
Total (Rp.)					

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

3.1.2. Identifikasi tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan Kepada tingkatan Pemerintahan tingkat di bawahnya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan tingkat di bawahnya, karena tidak ada mendapatkan tugas pembantuan yang diberikan. Alokasi Anggaran serta Realisasi Anggaran, dapat dilihat pada Tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan tingkat di bawahnya Tahun Anggaran 2025

No.	Perangkat Daerah	Program	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Penyerapan (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Tidak Ada Tugas Pembantuan				
Total (Rp.)					

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPM DPPKB Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

3.2. Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Memuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah tingkat di atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintah di bawahnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya dan tidak ada Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan tingkat di bawahnya, karena tidak ada mendapatkan tugas pembantuan yang diberikan. Jadi tidak adanya hambatan / permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaiannya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah digunakan untuk biaya pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, maka diperoleh total sasaran strategis capaian kinerja 118,31%. Sedangkan untuk melaksanakan 2 Urusan, 7 Program, 16 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025, maka diperoleh total anggaran Rp. 15.510.426.366 dan terrealisasi anggaran Rp. 13.204.978.049 sedangkan untuk capaian anggaran 85,14%.
2. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran Sebelumnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tidak Ada Rekomendasi DPRD.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 tidak ada mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintahan tingkat di atasnya dan tidak ada Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan tingkat di bawahnya, karena tidak ada mendapatkan tugas pembantuan yang diberikan.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini akan menjadi masukan terhadap Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Painan, 5 Januari 2026

